



Transparansi Pemprov dan Pemkot Jeblok

KANDIDAT HARUS MAMPU PERBAIKI CITRA

SERANG - Para kandidat calon Gubernur Banten harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengusung program transparansi pemerintah. Apalagi, peringkat transparansi Pemprov

Banten dan Pemkot Serang pada tahun 2015 ternyata cukup jeblok.

Menurut penilaian Komisi Informasi Republik Indonesia (RI), peringkat transparansi Pemprov Banten 2015 menempati urutan ke delapan dengan nilai 71, 17. Peringkat tersebut turun

drastis dari sebelumnya pada 2014, menempati urutan keempat. Sementara menurut penilaian Komisi Informasi Banten, peringkat transparansi Pemkot Serang pada tahun 2015, paling buruk atau urutan terakhir dari delapan kabupaten/kota di Banten.

Ke hlm 7

Transparansi Pemprov...

Padahal, transparansi publik dinilai sebagai kunci partisipasi masyarakat dalam pembangunan Banten. Prinsip tersebut menjadi upaya nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Memang benar, Banten itu yang mulanya peringkat empat, turun ke delapan. Termasuk Kota Serang yang pada 2014 sudah kurang bagus semakin jeblok pada 2015," kata Komisioner KIP Banten Ade Jahran kepada *Radar Banten*, Senin (5/4). Ade menilai, kemerosotan tersebut disebabkan beberapa hal. Antara lain akses *website* Pemprov Banten yang lambat, dan data satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum mendukung. "Kita sempat menghubungi KI pusat terkait ini, bahasa orang pusat kerena *website* agak lelet. Berbeda dengan Aceh yang sederhana tapi bagus," kata pria yang akan meluncurkan buku berjudul '*Transparansi Setengah Hati*' ini.

Selain itu, sarana pendukung untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama juga menjadi faktor kemerosotan penilaian transparansi. "PPID tidak ada ruangan khusus, berbeda dengan daerah lain yang sudah memiliki.

Walaupun itu tidak mendesak, tapi jadi penilaian. Kemudian, ketika kita buka *website* bantenprov.co.id, dan kita klik link SKPD lain, data di situ sangat minim," kata Ade.

Pemprov Banten harus segera melakukan perbaikan sebagai bentuk kesungguhan menjalankan keterbukaan informasi publik. "Saran saya ke depan, teman-teman PPID jangan suka mengeluh, ini ada sidang di KI seolah-olah menghambat pekerjaan dan tugas yang lain. Karena kita semua hanya menjalankan undang-undang sebagai tugas Negara," kata pria yang mengawali karirnya sebagai wartawan ini.

Menurutnya, tidak ada yang sulit untuk menjalankan transparansi publik karena semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Kata dia, keterlibatan semua pihak dalam mendorong transparansi akan mendorong partisipasi publik menuju pemerintahan yang bersih. "Sampai hari ini tidak ada yang menyanggah bahwa terjadinya korupsi berawal dari tertutup. Apalagi kita sudah masuk ke era digital yang bisa mempublikasikan informasi yang semata-mata untuk kemajuan Banten," katanya.

Dari hlm 1

Pada *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) bakal calon gubernur yang dilakukan DPD PDIP Banten, hanya Andika Hazrumy yang mengutarakan program transparansi anggaran. Andika menilai, transparansi mendorong sistem pemerintahan yang akuntabel dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan setiap kebijakan pembangunan.

Direktur Pattiro Banten Agus Salim menilai, Pilgub Banten 2017 menjadi momentum penting untuk mengkampanyekan semangat transparansi. Ia pun mengapresiasi Andika yang berani berkomitmen menciptakan transparansi anggaran. "Saya berharap ada calon yang salah satu visinya mendorong transparansi. Karena akan mengasikkan partisipasi publik yang akhirnya melahirkan good government," katanya.

Kata Agus, citra transparansi publik menjadi titik keberangkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Banten. "Kita sudah masuk ke era serba terbuka, maka penyelenggaraan pemerintah juga harus terbuka dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terbangun," katanya. (mg04/run/ags)